

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tambelang mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian lapangan berupa studi dokumentasi, observasi dan wawancara terhadap informan penelitian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan PKH di Kecamatan Tambelang pada tahun 2021 berjalan sesuai rencana perumus kebijakan PKH yaitu pemerintah pusat. Hal ini dilihat dari tersebarnya jumlah penerima bantuan disetiap desa yang ada di Kecamatan Tambelang. Tentang evaluasi masih belum berjalannya proses pendataan, masih lemahnya pemahaman petugas dan masyarakat peserta penerima bantuan, hingga belum menyeluruhnya warga miskin yang di-cover oleh program ini, merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan yang tersu diperbaiki setiap tahunnya.
2. Hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa kecenderungan dalam pelaksanaan kebijakan program PKH di Kecamatan Tambelang, antara lain sebagai berikut:
  - a. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program PKH, adanya rapat koordinasi oleh para pemangku kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan PKH. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terjadi koordinasi yang tidak searah diantara tingkat atas (kecamatan) dengan bawah (desa) yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pendataan.
  - b. Terdapat program kerja yang diturunkan dari program umum di tingkat Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan program PKH. Diantaranya program kegiatan sosialisasi dan pendataan. Meskipun dalam pelaksanaan diraskan belum maksimal dalam sosialisasi dan pendataan

yang belum sinergis diantara pemerintah tingkat Kabupaten hingga tingkat desa dalam data RTSM.

- c. Bentuk tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan di dasari pada wewenang dalam hirarki pemerintahan.
  - d. Konsistensi dari para pelaksana kebijakan yaitu menjalankan pekerjaan sesuai sesuai aturan dalam program PKH dan sesuai dengan kewenangannya.
  - e. Terdapat dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan kehadiran dalam kegiatan rapat dan sosialisasi, serta memberikan data dan keterangan yang diperlukan. Hanya saja masih terdapat masyarakat yang tidak secara aktif memberikan data keluarganya yang membutuhkan, sehingga terjadi keterlambatan dalam penerimaan bantuan.
  - f. Tingkat pemahaman masyarakat masih beragam, sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang program PKH.
  - g. Secara teknis, mekanisme diatur dalam panduan pelaksanaan PKH. Hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih terdapat kegagalan dalam pendataan yaitu tidak semua masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan masuk dalam pendataan. Kemudian dalam verifikasi juga masih terdapat ketidaksesuaian antara data keluarga miskin berhaak dengan kenyataan pada calon peserta yang mampu secara ekonomi.
  - h. Anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan program PKH. Hal tersebutnya adalah masih kurangnya serapan kepesertaan karna masih banyak warga yang berhak menerima bantuan. Hal lainnya adalah kinerja sosialisasi yang terhambat karena kurang maksimalnya anggaran kegiatan
3. Adapun hambatan yang dialami adalah masih kurangnya kemampuan birokrasi tingkat daerah kecamatan hingga desa dalam menyusun program kerja yang mampu menghasilkan kebijakan PKH menjadi ideal dalam pelaksanaannya, hal ini berdampak terhadap:

a. Proses Pendataan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, proses pendataan dalam menentukan peserta penerima Program PKH di Kecamatan Kecamatan Tambelang sudah dilakukan dengan prosedur dan ketentuan Program PKH. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH, tetapi belum mendapatkan. Jika melihat kondisi dari fenomena tersebut, artinya pemutakhiran data perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan bahwa tidak pernah diadakan resertifikasi langsung ke rumah peserta program keluarga harapan. Mereka hanya melakukan resertifikasi pada saat proses pembayaran.

b. Proses Sosialisasi

Hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa sosialisasi pada masyarakat Tambelang terkait PKH masih sangat kurang jika melihat pada program PKH dilaksanakan dalam 1 tahun. Ditemukan fakta tingkat pemahaman masyarakat peserta masih sangat jauh dari konsep program PKH, hal lainnya adalah masih ada juga di kalangan aparat pemerintah yang belum memahami konseptual dari program PKH. Proses sosialisasi yang masih kurang juga berdampak pada tingkat aplikasi bantuan oleh peserta. Ditemukan fakta lapangan dimana masih ada peserta yang tidak mengalokasikan uangnya untuk membiaya pendidikan ataupun kebutuhan kesehatan bagi anggota keluarganya. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan semangat peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dari kebijakan PKH itu sendiri.

4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Implementasi Kebijakan PKH di Kecamatan Tambelang

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Tambelang, antara lain;

- a. Memaksimalkan peran dari petugas pendamping dalam mentransformasikan materi tentang program PKH kepada masyarakat terutama peserta penerima bantuan
- b. Meminta bantuan kepada Tim Pelaksana PKH tingkat Kabupaten Bekasi untuk memberikan penampingan dalam proses transformasi kebijakan terhadap pegawai pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga pengurus wilayah RW/RT.
- c. Mengajukan hasil evaluasi pelaksanaan program PKH di Kecamatan Tambelang pada tahun 2015 kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui Unit Pelaksana PKH tingkat Kabupaten agar menjadi pertimbangan untuk penambahan anggaran dan peserta PKH di Kecamatan Tambelang untuk periode penyaluran bantuan tahun berikutnya.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Proses pendataan dilakukan secara sederhana, dengan melibatkan aparat wilayah desa hingga RW/RT, didahului dengan proses transformasi konseptual kebijakan program PKH kepada para aparatur tersebut. Hal ini sangat penting mengingat model kebijakan PKH sangat membutuhkan kapasitas yang memadai dari aparatur pemerintah di wilayah yang dekat dengan masyarakat agar dapat menjadi juru sosialisasi yang baik bagi masyarakat yang kurang memahami program.
2. Mensinergikan keterpaduan antar program-program penanggulangan kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada PKH semata, namun juga kebijakan pengurangan biaya primer lainnya seperti biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan primer lainnya.
3. Untuk pemerintah Kabupaten Bekasi sebaiknya dilakukan proses publikasi data kemiskinan dan program PKH secara menyeluruh. Hal ini penting untuk membuka informasi kepada masyarakat luas sebagai bahan bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.